

Available online at Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah>  
 Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 27 (2), 2023, 152-171

## **Potret Kerukunan Lintas Agama Dalam Membina Dinamika Sosial Desa**

M. Taufik Hidayatulloh  
 Panyuluh Agama Kab. Bogor  
 taufikmtht76@gmail.com

Wahyuni  
 Penggiat Kerukunan Kecamatan Ciseeng, Kab. Bogor  
 wahyuniayu6678@gmail.com

### *Abstract*

*The harmony among religious communities in Pabuaran Village, which has long been established, needs to be maintained, strengthened, and fostered through active collaboration among its diverse religious communities to develop the potential and community resources. Hence, the Pabuaran Village Harmony Association (PKDP) was formed. The research methodology used in this study is a descriptive qualitative approach with the Miles and Huberman analysis model. The findings of this study include: 1) PKDP was formed on the basis of togetherness in diversity. Each member has equal influence and equal rights in deliberation and decision-making. This is in contrast to many other institutions that often have strict hierarchies and the dominance of certain individuals. 2) The existence of a balanced leadership rotation mechanism between religions has been a progressive and inclusive step in ensuring diversity is equally represented in the leadership of the institution. This finding is different from some other institutions that tend to appoint leaders based on the preferences of the majority group. 3) The findings show that PKDP is able to cope well with pressures from within and outside the institution. In facing pressure from within, PKDP builds a culture of dialog and open communication to resolve conflicts. Meanwhile, to deal with external pressures, PKDP builds networks and cooperation with various related parties. This finding is surprising because PKDP is able to maintain the integrity and stability of the institution in the face of internal and external challenges. 4) PKDP periodically evaluates and revises institutional rules to keep them in line with community needs and social dynamics. All members are involved in the evaluation and revision process to ensure that the rules are in line with members' aspirations. This finding is different from some other institutions that tend to be less responsive to social change.*

*Keywords: Institutional Dynamics, Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran, Religious Community Harmony*

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/dakwah.v27i2.36704>

## POTRET KERUKUNAN LINTAS AGAMA DALAM MEMBINA DINAMIKA SOSIAL DESA

M. Taufik Hidayatulloh  
Panyuluh Agama Kab. Bogor  
taufikmtht76@gmail.com

Wahyuni  
Pegiat Kerukunan Kecamatan Ciseeng, Kab. Bogor  
wahyuniayu6678@gmail.com

### *Abstract*

*Kerukunan umat beragama di Desa Pabuaran yang telah terjalin sejak lama perlu diperkuat dengan cara dihidupkan kerja sama aktif antar umat beragamanya untuk mengembangkan potensi masyarakatnya. Atas dasar itu maka dibentuklah Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP). Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini mendapatkan: 1) PKDP dibentuk dengan dasar kebersamaan dalam keberagaman. Setiap anggota memiliki pengaruh yang sama dan hak yang setara dalam bermusyawarah dan pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan banyak lembaga lain yang seringkali memiliki hirarki yang ketat dan dominasi dari beberapa individu tertentu. 2) Adanya mekanisme rotasi kepemimpinan yang berimbang antar agama telah menjadi langkah yang progresif dan inklusif dalam memastikan keberagaman diwakili secara merata dalam pimpinan lembaga. Temuan ini berbeda dengan beberapa lembaga lain yang cenderung menunjuk pemimpin berdasarkan preferensi kelompok mayoritas. 3) Temuan menunjukkan bahwa PKDP mampu mengatasi tekanan dari dalam dan luar lembaga dengan baik. Dalam menghadapi tekanan dari dalam, PKDP membangun budaya dialog dan komunikasi yang terbuka untuk menyelesaikan konflik. Sementara itu, untuk menghadapi tekanan dari luar, PKDP membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Temuan ini mengejutkan karena PKDP mampu menjaga keutuhan dan kestabilan lembaga dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. 4) PKDP secara berkala melakukan evaluasi dan revisi aturan lembaga agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial. Seluruh anggota terlibat dalam proses evaluasi dan revisi untuk memastikan kesesuaian aturan dengan aspirasi anggota. Temuan ini berbeda dengan beberapa lembaga lain yang cenderung kurang responsif terhadap perubahan sosial.*

**Kata Kunci:** *Dinamika Kelembagaan, Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran, Kerukunan Umat Beragama*

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan pluralitas masyarakatnya. Sebuah negara yang kaya akan keragaman suku, agama, dan budaya. Namun, di tengah keberagaman ini, konflik berlatar belakang agama

seringkali timbul, mengancam harmoni dan persatuan bangsa. SETARA Institute mencatat banyak insiden pelanggaran kebebasan beragama dan konten ujaran kebencian berbasis SARA, yang menunjukkan adanya gesekan antar umat

beragama di Indonesia.<sup>1</sup> Konflik berlatar belakang agama juga sering muncul akibat perbedaan keyakinan dan pandangan hidup. Belum lagi ujaran kebencian yang berlatar SARA dapat mengisi celah persatuan yang ada. Berdasar pada hasil Konferensi Pers Virtual dari Media Center Kantor Kementerian Kominfo pada April 2021 lalu, ditemukan fakta bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani 3.640 konten yang berisi tentang ujaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) sejak tahun 2018.<sup>2</sup> Baik konflik maupun tindakan yang memicu gesekan antar umat beragama dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, karena bisa memecah belah dan memperkuat perbedaan daripada memperkuat persamaan dan nilai-nilai bersama.

Konflik di beberapa daerah yang berlatar belakang perbedaan agama telah menimbulkan ketegangan dan ketidakamanan, seperti insiden bentrok antara kelompok agama yang berbeda di beberapa kota. Menjadikan kita harus waspada terhadap potensi konflik berlatar belakang agama yang dapat mengancam harmoni dan persatuan bangsa. Penting juga bagi kita semua untuk mempromosikan toleransi serta saling memahami antar umat beragama. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

Kerukunan umat beragama menegaskan bahwa penting untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling pengertian antar umat beragama. Dalam lingkungan yang beragam, sikap ini akan memungkinkan terciptanya hubungan yang harmonis dan damai. Agama dalam hal ini memiliki potensi sebagai alat untuk menciptakan perdamaian dan mengatasi konflik.

Agama dalam praktiknya memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat yang mencakup fungsi edukatif, penyelamat, perdamaian, kontrol sosial, memupuk rasa solidaritas, transformatif dan sublimatif.<sup>3</sup> Fungsi agama sebagai fungsi perdamaian bagi masyarakat memiliki keterkaitan kuat dengan hidup rukun, aman dan toleransi antar umat beragama. Sehingga, kita semestinya tidak merusak kedamaian yang ada yang memicu perpecahan antara sesama di dunia, justru seharusnya menciptakan perdamaian dan menggapai kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 56:<sup>4</sup> *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”*. Prinsip-prinsip moral dan etika dalam agama dapat menjadi landasan bagi upaya meredam ketegangan dan membangun kesepahaman antar umat beragama. Sebagai tambahan, kerukunan umat beragama dapat menjadi perekat yang memperkuat keutuhan sosial dalam suatu masyarakat. Dengan adanya harmoni antar umat beragama, kesatuan dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama dapat ditingkatkan.

Sebagaimana praktik di beberapa negara dengan keberagaman agama, kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama biasa dilakukan, seperti pendirian tempat ibadah bersama dan peringatan hari-hari besar agama bersama. Dengan memanfaatkan potensi agama sebagai alat menciptakan perdamaian, kita optimis akan dapat memperkuat keutuhan sosial dalam masyarakat yang beragam itu.

Di tengah beragamnya agama dan kepercayaan di Indonesia, menjaga kerukunan umat beragama menjadi prioritas penting untuk mewujudkan

kedamaian bagi seluruh warga negara. Adanya forum-dialog seperti FKUB dan lembaga kerukunan, seperti PKDP di Desa Pabuaran, menjadi langkah konkret untuk memelihara kerukunan antar umat beragama. Pemerintah memfasilitasi hadirnya forum yang bisa menjadi wadah untuk melakukan dialog antar umat beragama dan mensosialisasikan pesan kerukunan melalui peraturan yang dibuat Pemerintah. Sebagaimana salah satu isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 adalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagaimana diatur pada Bab III Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.<sup>5</sup> Dengan adanya forum-dialog ini, diharapkan kesalahpahaman dan konflik antar agama dapat diminimalkan melalui komunikasi partisipatif dan saling memahami.

Forum-dialog, seperti FKUB dan/atau PKDP, memberikan tempat bagi para pemangku kepentingan dari berbagai agama untuk berinteraksi secara terbuka. Melalui forum ini, perbedaan pandangan dan kepentingan dapat diajukan, didengarkan, dan dipertimbangkan bersama-sama. Secara garis besar, tugas FKUB/PKDP ini sendiri sebagai forum dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat yang di dalamnya dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dari ormas keagamaan maupun masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah dan melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Forum-dialog ini mendorong komunikasi yang

partisipatif, di mana masing-masing pihak dapat berbicara, mendengarkan, dan memahami sudut pandang dan kebutuhan satu sama lain. Dengan demikian, kesalahpahaman dapat diminimalkan, dan kerukunan antar umat beragama dapat ditingkatkan.

Sebagai contoh, PKDP di Desa Pabuaran mengadakan kegiatan anjangsana para anggota ke tempat ibadah di hari-hari besar keagamaan masing-masing, sehingga saling memahami tradisi dan kepercayaan agama satu sama lain. Melalui forum-dialog, sosialisasi peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan kebebasan beragama dan beribadah dapat diselenggarakan, sehingga pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam beragama semakin jelas bagi masyarakat.

Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan latar belakang dan pentingnya kerukunan umat beragama di Indonesia, dengan fokus pada keberadaan PKDP di Desa Pabuaran sebagai salah satu contoh forum kerukunan tingkat desa. Tulisan ini juga ingin menyoroti peran PKDP sebagai forum-dialog antar umat beragama yang didukung pemerintah (di berbagai levelnya) dalam mempromosikan, menjaga, dan memberdayakan umat beragama untuk mencapai kerukunan dan kesejahteraan bersama. Diharapkan tulisan ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kerukunan umat beragama dan mempromosikan upaya untuk mewujudkannya demi menciptakan masyarakat yang harmonis.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjelaskan dinamika Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP) dalam menjaga kerukunan umat

beragama di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang terdiri dari serangkaian praktik penaksiran material yang membuat fenomena menjadi terlihat, mengubah fenomena menjadi serangkaian representasi yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi. Sehingga, penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang naturalistik terhadap fenomena yang terjadi.<sup>7</sup>

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP), *stakeholder* Desa Pabuaran (Kepala Desa), Inisiator Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP), dan masyarakat. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah dinamika dalam Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP) dalam menjaga kerukunan umat beragama, pola hubungan dalam kelembagaan PKDP, dan keberlangsungan pengembangan (PKDP) sebagai lembaga kerukunan dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Penelitian ini berlokasi di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Waktu penelitian dimulai dari Juli 2022 sampai dengan Oktober 2022. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menurut Miles dan Huberman yang menyarankan tiga tahap dalam analisis data penelitian kualitatif, yakni: reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Temuan Penelitian

PKDP merupakan lembaga yang didirikan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Pabuaran. Lembaga ini menjadi wadah bagi para tokoh perwakilan dari setiap agama untuk memudahkan komunikasi dan menyampaikan aspirasi mengenai masalah kehidupan keagamaan di masyarakat. PKDP hadir sebagai respons atas kebutuhan untuk memelihara kerukunan antar umat beragama di Desa Pabuaran. Dengan menjadi wadah bagi para tokoh perwakilan agama, PKDP memungkinkan terciptanya dialog dan musyawarah antar umat beragama. Hal ini akan memfasilitasi penyelesaian masalah kehidupan keagamaan secara bersama-sama dan memperkuat kerukunan di tengah perbedaan. PKDP tidak hanya fokus pada aspek kerukunan, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan lokal. Melalui pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan pelestarian budaya, lembaga ini berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan wilayah Desa Pabuaran.

Selama berkiprah, PKDP telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dialog antar umat beragama, termasuk anjangsana para anggota ke tempat ibadah pada hari-hari besar keagamaan, yang memperkuat kerukunan dan memahami tradisi agama lain. Selain itu, PKDP juga telah menginisiasi kegiatan pariwisata berbasis budaya, seperti festival budaya, yang tidak hanya mempertahankan budaya leluhur, tetapi juga menarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa Pabuaran, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Melalui forum-dialog dan dukungan terhadap pembangunan lokal, PKDP mampu menciptakan lingkungan

harmonis di tengah beragamnya agama dan kepercayaan. Kerjasama aktif antar umat beragama dalam PKDP juga memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi-potensi masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama.

### **1. Masalah kepengurusan dan anggota**

Pengurus dan anggota PKDP berasal dari para tokoh perwakilan tiap agama di Desa Pabuaran, yang dipilih berdasarkan kriteria penting untuk memastikan kesesuaian peran dan kontribusi mereka dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kriteria tersebut meliputi jiwa nasionalis yang berasaskan Pancasila, pemahaman tentang pola hidup bermasyarakat, latar belakang dan pengalaman organisasi serta pendidikan, dan cara pandang mereka terhadap keberagaman dan keyakinan. Pengurus dan anggota PKDP yang dipilih berdasarkan kriteria penting membantu memastikan bahwa lembaga ini diisi oleh individu-individu yang memiliki kapabilitas, pengetahuan, dan sikap yang tepat dalam memelihara kerukunan umat beragama. Anggota PKDP berasal dari tiap agama yang ada di Desa Pabuaran, sehingga lembaga ini memiliki representasi yang merata dan dapat mewakili seluruh komunitas keagamaan dalam menyampaikan pesan-pesan kerukunan.

Anggota PKDP memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman yang kaya serta memiliki pandangan inklusif pada gilirannya akan dapat mengadvokasi perdamaian dan berusaha untuk meredam ketegangan antara kelompok agama ketika muncul perbedaan pendapat dalam menghadapi isu-isu keagamaan. Dengan kriteria penting yang digunakan untuk memilih pengurus dan anggota PKDP, lembaga ini dapat berfungsi sebagai representasi yang mewakili seluruh komunitas keagamaan di Desa Pabuaran

dalam menjaga kerukunan. Selain itu diharapkan bahwa anggota PKDP memiliki peran dan kontribusi yang penting untuk mendukung eksistensi dan dampak positif dari kegiatan lembaga ini bagi masyarakat.

PKDP (Pusat Kerukunan Umat Beragama) di Desa Pabuaran memiliki pengurus dan anggota yang berasal dari para tokoh perwakilan dari setiap agama di wilayah tersebut. Tokoh-tokoh ini dipilih oleh umat agamanya masing-masing berdasarkan kriteria penting, termasuk ketokohnya dan kemampuannya untuk mewakili umat dalam PKDP. Selain itu, kriteria lain yang dianggap penting dalam pemilihan tokoh tersebut adalah jiwa nasionalis berdasarkan Pancasila, pemahaman tentang pola hidup bermasyarakat, latar belakang dan pengalaman organisasi serta pendidikan, serta pandangan mereka terhadap keberagaman dan keyakinan.

Proses pemilihan tokoh pengurus dan anggota PKDP tidak dilakukan secara sembarangan. Para tokoh yang mewakili agamanya di PKDP harus melewati pertimbangan dan dinilai apakah mereka memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan tokoh yang tepat penting karena mereka tidak hanya berperan sebagai perwakilan agama tetapi juga harus menjadi cerminan dari PKDP itu sendiri dalam menyampaikan tujuan dan pesan-pesan dari lembaga tersebut. Kontribusi dan peran dari tokoh dan anggota PKDP sangat penting untuk mendukung eksistensinya, agar kegiatan yang dilakukan oleh PKDP dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengungkapkan bahwa proses pemilihan pengurus dan anggota PKDP di Desa Pabuaran sangat selektif.

Dari penuturan narasumber, terlihat bahwa tokoh-tokoh yang menjadi

pengurus dan anggota PKDP dipilih berdasarkan pertimbangan yang cermat dan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah dijelaskan. Pemahaman tentang keberagaman dan pentingnya hidup rukun antar umat beragama menjadi fokus utama dalam pemilihan tokoh ini. Kriteria-kriteria tersebut tidak dijelaskan secara tertulis, tetapi setiap tokoh diharapkan memiliki jiwa nasionalis, pemahaman pola hidup bermasyarakat, latar belakang dan pengalaman organisasi serta pendidikan yang memadai, dan pandangan yang bijaksana terhadap keberagaman dan keyakinan. Wawancara dengan narasumber juga mengungkapkan bahwa kriteria-kriteria pemilihan tokoh PKDP tidak dijelaskan secara tertulis, namun pemahaman yang baik tentang keberagaman dan pentingnya hidup rukun antar umat beragama menjadi faktor kunci dalam pemilihan. Selain itu, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, dan pemahaman tentang pola hidup bermasyarakat juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan tokoh. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan kesadaran tokoh dan anggota PKDP dalam menjaga kerukunan umat beragama di Desa Pabuaran.

## **2. Tentang aturan kelembagaan**

Struktur kelembagaan dalam PKDP didasarkan pada asas kolektif kolegial, di mana sistem kepemimpinan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Penggunaan sistem kepemimpinan kolektif kolegial bertujuan untuk menciptakan kebersamaan dan memastikan semua pihak yang terlibat memiliki pengaruh dan hak yang sama dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan. Pemilihan kepengurusan PKDP dilakukan melalui musyawarah bersama para tokoh agama dan

stakeholder desa, seperti kepala desa dan aparatur desa lainnya. Setiap tokoh agama yang duduk di PKDP diusung oleh umat agamanya karena ketokohnya dan dipilih berdasarkan kriteria khusus yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam kepengurusan PKDP, semua anggota memiliki pengaruh dan hak yang sama dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan, karena lembaga ini dibentuk dengan dasar kebersamaan dalam keberagaman. Dengan menerapkan sistem kepemimpinan kolektif kolegial, PKDP berhasil menciptakan lingkungan yang harmonis di tengah keberagaman agama. Hal ini menjadikan PKDP sebagai lembaga yang kuat dan efektif dalam menjaga kerukunan dan memajukan masyarakat di Desa Pabuaran.

Dalam hasil observasi terhadap aturan kelembagaan PKDP, pembentukan struktur organisasi dan pemilihan kepengurusan dilakukan melalui proses musyawarah. Para tokoh agama yang hadir bersama stakeholder desa, termasuk kepala desa dan aparatur desa lainnya, ikut berpartisipasi dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang kepengurusan yang akan dipilih. Proses ini bertujuan agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima bersama oleh semua pihak yang terlibat dan setiap peserta musyawarah diberi kesempatan untuk mengusulkan nama-nama calon pengurus yang mewakili agama-agama dan struktur kelembagaan lainnya.

Aturan kelembagaan PKDP didasarkan pada asas kolektif kolegial, di mana sistem kepemimpinan yang digunakan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Hal ini juga menunjukkan semangat partisipatif dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Sistem kepemimpinan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan membawa kontribusi dari para tokoh agama dan stakeholder desa

untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua anggota lembaga. Proses musyawarah menjadi wadah untuk menampung pendapat dan usulan dari berbagai pihak, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan bersama dan meminimalisir konflik di dalam lembaga. Dalam kepengurusan PKDP, pengaruh setiap individu, terutama para tokoh agama yang terlibat, memiliki tingkat kekuatan yang relatif sama. Mereka dipilih oleh masing-masing umat agama karena ketokohnya dan melalui kriteria khusus yang telah dijelaskan sebelumnya. Setiap tokoh agama memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan PKDP di masyarakat, dan saat berada dalam kepengurusan, semua anggota memiliki hak yang sama untuk bermusyawarah dan berdiskusi, serta dijunjung tinggi dalam suasana saling menghormati dan menghargai.

Penggunaan proses musyawarah dalam pembentukan struktur kelembagaan PKDP menunjukkan komitmen untuk mencapai kesepakatan yang inklusif dan memperkuat partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan. Pendekatan kolektif kolegial dalam sistem kepemimpinan lembaga ini memberikan peluang yang sama bagi setiap tokoh agama untuk memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja PKDP. Selain bahwa pendekatan kolektif kolegial dalam sistem aturan kelembagaan PKDP mencerminkan pentingnya partisipasi dan inklusivitas dalam pengelolaan lembaga kerukunan tersebut. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kebersamaan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kepengurusan PKDP menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai setiap anggota lembaga. Dengan melibatkan para tokoh agama dan stakeholder desa dalam musyawarah, semua pihak memiliki kesempatan yang

sama untuk berkontribusi dan memiliki peran dalam struktur kepengurusan. Kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan juga mencerminkan adanya saling menghargai dan menghormati antara anggota lembaga, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan efektif dalam mencapai tujuan PKDP untuk mendukung pengembangan potensi kerukunan di Desa Pabuaran. Proses musyawarah dan pengaruh yang relatif setara ini mendorong keberagaman dan kesetaraan dalam lembaga kerukunan ini, sehingga tujuan kelembagaan untuk mendukung pengembangan potensi kerukunan di Desa Pabuaran dapat tercapai dengan lebih efektif dan harmonis.

### **3. Sisi kepemimpinan**

PKDP (Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran) menerapkan struktur kepemimpinan yang menganut asas kolektif kolegial. Dalam struktur ini, terdapat ketua umum dan 6 ketua dari tiap agama, sekretaris bendahara, serta seksi-seksi bidang. Penyusunan struktur ini bertujuan untuk memastikan keputusan diambil secara bersama-sama dan mewakili seluruh agama yang ada di Desa Pabuaran. Melalui penerapan struktur kepemimpinan yang merata dalam PKDP memastikan representasi yang adil dari setiap agama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, semua komunitas keagamaan dapat memiliki perwakilan yang setara dan memiliki suara dalam segala hal yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

Saat membahas program pemberdayaan masyarakat, seksi-seksi bidang bekerja bersama-sama untuk merumuskan rencana dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam diskusi mengenai alokasi anggaran, keputusan diambil melalui voting bila tidak dapat

diputuskan secara mufakat, memberikan kesempatan bagi setiap anggota untuk menyampaikan dukungan atau sanggahan terhadap rencana anggaran yang diajukan. PKDP sebagai lembaga kerukunan umat beragama di Desa Pabuaran telah menunjukkan kesuksesannya dalam menerapkan struktur kepemimpinan yang kolektif kolegial. Dengan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, PKDP berhasil menciptakan representasi yang merata, mencari kesepahaman dan kompromi, serta memastikan partisipasi penuh dari setiap komunitas keagamaan yang ada.

Dalam PKDP, kepemimpinan dijalankan dengan asas kolektif kolegial, yang tercermin dari struktur lembaga tersebut. PKDP saat ini terdiri dari ketua umum dan enam ketua dari setiap agama, serta sejumlah posisi lainnya seperti sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi bidang. Struktur ini dibentuk untuk memberikan arahan dan mengurus berbagai aspek administratif dan keuangan lembaga. Asas kolektif kolegial diadopsi untuk mengimplementasikan kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif di PKDP. Struktur dengan ketua dari setiap agama menunjukkan semangat kebersamaan dan pengakuan atas pentingnya peran masing-masing agama dalam kerukunan umat beragama. Tugas-tugas yang terbagi dengan jelas di dalam lembaga mengindikasikan adanya perencanaan dan pengorganisasian yang matang. Kepemimpinan kolektif kolegial ini juga memungkinkan setiap anggota memiliki peran dan kontribusi dalam menyumbangkan ide dan gagasan, sehingga mewakili keberagaman pandangan dan perspektif yang ada.

Narasumber menyampaikan beberapa keterbatasan dan kendala yang dihadapi oleh PKDP terkait kepemimpinan dan pelaksanaan tugas dan fungsi kepengurusan. Di antaranya

karena faktor internal pribadi, seperti kesadaran dan pola pikir intelektual. Selain itu, PKDP belum memiliki payung hukum yang jelas karena belum memiliki Surat Keputusan (SK) untuk lembaga dan kepengurusannya. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan program kerja lembaga.

PKDP mengalami kevakuman dan sedang dalam proses pemulihan serta penanganan masalah yang perlu dibenahi. Masih belum matangnya gambaran dan konsep tugas serta program masing-masing anggota menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi dalam menjalankan peran lembaga. Wawancara juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan atau rapat yang diadakan, musyawarah berlangsung baik dengan asas musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan secara toleran terhadap perbedaan pendapat dan pelanggaran yang ada. PKDP berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan komunikasi yang baik dan tetap mempertimbangkan kepentingan umat dari agamanya masing-masing.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa asas kolektif kolegial dalam kepemimpinan PKDP sejalan dengan pengalaman dan pandangan para narasumber. Hal ini menunjukkan partisipasi aktif dari anggota lembaga dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga. Dengan asas musyawarah untuk mufakat, setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan semangat kolektif kolegial yang menghargai keberagaman pandangan dan memprioritaskan kepentingan bersama di dalam lembaga.

#### **4. Tekanan kelembagaan**

PKDP (Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran) merupakan lembaga yang mewadahi para tokoh agama dengan tujuan untuk menjaga kerukunan umat

beragama di Desa Pabuaran. Beberapa kendala yang ditemui lembaga ini terutama terkait dengan Surat Keputusan (SK) dan masalah pendanaan. PKDP menjadi penting karena dalam keberagaman agama yang ada di Desa Pabuaran, lembaga ini berperan sebagai wadah untuk memperkuat dan mendukung kerukunan masyarakat serta mengembangkan potensi desa.

Sebagaimana dijelaskan oleh para narasumber bahwa tidak ada masalah berarti atau tekanan dari dalam PKDP itu sendiri yang bisa memecah lembaga. Sementara itu, pengunduran diri ketua umum sebelumnya dikarenakan faktor personal dari profesi yang bersangkutan. Disadari bahwa PKDP memiliki kekuatan pada kemampuan dan kesanggupan orang-orang atau pengurus yang ada di dalamnya, namun kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang PKDP yang berdampak pada rendahnya partisipasi langsung masyarakat. Kelemahan lain yang dapat digolongkan sebagai tekanan adalah belum adanya anggaran khusus lembaga, karena belum memiliki SK yang ditetapkan institusi terkait. Bilapun selama ini terdapat kegiatan, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut masih menggunakan dana pribadi para anggotanya. PKDP sebagai lembaga kerukunan umat beragama di Desa Pabuaran telah berhasil mendapatkan respon baik dari masyarakat. Meskipun menghadapi kendala terutama terkait dengan SK dan pendanaan, PKDP berkomitmen untuk terus mengembangkan program kerjanya agar bisa memberdayakan masyarakat yang hidup rukun antar umat secara lebih aktif.

Hasil observasi terhadap Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP) menunjukkan bahwa lembaga ini tidak mengalami masalah atau tekanan dari dalam yang dapat memecahnya. Pengunduran diri ketua umum

sebelumnya dikarenakan faktor personal dari profesi yang bersangkutan, bukan karena tekanan internal. PKDP memiliki kekuatan pada kemampuan dan kesanggupan anggota serta masih menggunakan dana pribadi para anggota dalam kegiatannya karena belum memiliki anggaran khusus dan Surat Keputusan (SK) dari institusi terkait. Sehingga saat ini, PKDP lebih fokus pada proses pembuatan Surat Keputusan (SK) yang ditunggu dari kabupaten atau provinsi.

PKDP berfungsi sebagai wadah bagi tokoh-tokoh agama di Desa Pabuaran untuk menjaga kerukunan umat beragama. Pengunduran diri ketua umum dan perubahan struktur kepengurusan terjadi karena kevakuman yang dialami PKDP, namun langkah ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja lembaga. Beberapa narasumber juga menyatakan bahwa tekanan atau intervensi dari luar tidak signifikan, dan saran-saran yang muncul berasal dari FKUB Kabupaten dan Balai Litbang Kemenag Jakarta. Hasil wawancara memberikan gambaran bahwa PKDP menghadapi tekanan kelembagaan yang dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Namun, tekanan dari dalam lebih mudah diatasi karena dapat dikomunikasikan dengan baik oleh para anggota lembaga. Pengunduran diri ketua umum yang disebabkan oleh faktor personal menunjukkan pentingnya seleksi dan kesesuaian dalam memilih pemimpin lembaga. Selain itu, adanya intervensi dari pihak luar, seperti saran-saran dari FKUB Kabupaten, menunjukkan bahwa PKDP tidak berdiri sendiri dan perlu berkoordinasi dengan institusi lain dalam menjalankan kegiatannya.

Dari hasil observasi, terlihat bahwa PKDP memiliki pendekatan kerukunan umat beragama yang berbasis kebersamaan dan partisipasi aktif anggota. Struktur kepengurusan yang

mewakili setiap agama dan perubahan yang dilakukan menunjukkan semangat adaptasi dan kemauan untuk terus berkembang. PKDP juga menunjukkan respons yang positif dari masyarakat dengan adanya dukungan terhadap kehadiran lembaga ini dan keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatannya. Meskipun PKDP menghadapi kendala terkait SK dan pendanaan, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya menunjukkan upaya untuk tetap berkembang dan efektif dalam menjalankan misi sebagai lembaga kerukunan umat beragama. Pengunduran diri ketua umum dan perubahan struktur kepengurusan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga. Pengaruh dan saran-saran yang berasal dari luar, seperti FKUB Kabupaten dan Balai Litbang Kemenag Jakarta, menunjukkan keterlibatan dan ketergantungan PKDP dengan institusi lain dalam mengembangkan potensi kerukunan di Desa Pabuaran. Meskipun demikian, PKDP tetap berpegang pada nilai-nilai kerukunan dan memastikan keputusan dan kesepakatan diambil oleh anggota lembaga itu sendiri.

## **B. Analisis**

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengurus dan anggota PKDP adalah tokoh-tokoh agama yang diusung oleh umat agamanya karena ketokohnya dan kriteria khusus yang telah ditentukan. Mereka dipilih melalui proses musyawarah yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Anggota PKDP berasal dari berbagai latar belakang organisasi dan profesi, yang membawa keberagaman dan progresivitas dalam kegiatan lembaga. PKDP berhasil menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai dan menghormati antara anggotanya. Dalam hal pengurus dan anggota, penelitian ini

menunjukkan bahwa PKDP berhasil menghimpun tokoh-tokoh agama yang diusung oleh umatnya masing-masing. Hal ini menandakan bahwa masyarakat di Desa Pabuaran memiliki kesadaran akan pentingnya kerukunan antar agama dan bersedia berpartisipasi aktif dalam menjalankan kegiatan lembaga ini.

Kepemimpinan dalam PKDP dilakukan oleh ketua umum dan ketua dari masing-masing agama. Terjadi perubahan struktur kepengurusan dalam PKDP karena adanya kevakuman dan pengunduran diri ketua umum sebelumnya. Kepemimpinan dalam PKDP didasarkan pada asas kolektif kolegial, yang memungkinkan semua pihak memiliki pengaruh yang setara dalam pengambilan keputusan. Keberadaan kelembagaan yang mendukung dan memberdayakan para tokoh agama menjadi penting untuk mencapai tujuan PKDP. Pengaruh yang setara dan pengambilan keputusan melalui musyawarah menunjukkan bahwa lembaga ini berupaya mengedepankan kebersamaan dan partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan. Hal ini menandakan bahwa PKDP memberikan perhatian pada nilai-nilai demokrasi dan penguatan peran anggota dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, tidak ditemukan tekanan dari dalam PKDP itu sendiri yang dapat memecah lembaga. Pengunduran diri ketua umum sebelumnya dikarenakan faktor personal dari profesi yang bersangkutan. Tekanan dan masalah yang mungkin timbul dari dalam PKDP tergantung pada bagaimana para anggota mengkomunikasikan dan menyelesaikannya. Intervensi dari luar lebih mengarah kepada saran-saran yang berasal dari FKUB Kabupaten. Selain itu, campur tangan dari pihak luar juga melibatkan Balai Litbang Kementerian Agama Jakarta yang membantu dalam

perencanaan dan pertimbangan keputusan. Meskipun menghadapi berbagai tekanan, lembaga ini berhasil bertahan dan mengatasi tekanan tersebut dengan mengedepankan semangat kerjasama dan musyawarah. Hal ini menandakan bahwa PKDP memiliki fleksibilitas dan ketangguhan dalam menghadapi dinamika lingkungan yang selalu berubah.

Aturan kelembagaan PKDP dibentuk melalui proses musyawarah yang melibatkan para tokoh agama dan stakeholder desa. Struktur kepengurusan PKDP mengalami perubahan dengan asas kolektif kolegial, yang memungkinkan semua anggota memiliki pengaruh dan hak yang setara. PKDP berusaha mengenalkan diri kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh para tokoh agama di tempat ibadah. Hambatan utama yang dihadapi oleh PKDP adalah Surat Keputusan (SK) dari institusi terkait yang akan menaungi PKDP sebagai lembaga kerukunan antar umat beragama di Desa Pabuaran. PKDP didirikan melalui proses musyawarah yang melibatkan para tokoh agama dan stakeholder desa. Hal ini menandakan bahwa PKDP memiliki dasar yang kuat dalam mendirikan struktur organisasi dan memiliki dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Aturan lembaga ini mencerminkan semangat kebersamaan dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang berkepentingan.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, yaitu : *Pertama*, dari segi pengurus dan anggota, PKDP berhasil menghimpun dan melibatkan tokoh-tokoh agama dari masing-masing umat. Implikasi positif dari hal ini adalah bahwa PKDP memiliki potensi untuk menjadi platform inklusif bagi warga desa dengan beragam latar belakang agama. Keberagaman anggota ini juga memperkaya perspektif dan pengalaman dalam menghadapi berbagai

masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan representatif. *Kedua*, dalam hal kepemimpinan, PKDP menerapkan model kepemimpinan kolektif kolegial dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Implikasi positif dari model kepemimpinan ini adalah memperkuat partisipasi anggota dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan lembaga. Selain itu, model ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan PKDP. Dengan adanya pengaruh yang setara, semua anggota merasa dihargai dan diakui peran serta mereka, sehingga menciptakan suasana kerjasama yang harmonis.

*Ketiga*, hasil penelitian menunjukkan bahwa PKDP menghadapi berbagai tantangan dari dalam dan luar lembaga. Implikasi positif dari kemampuan PKDP dalam mengatasi tekanan ini adalah bahwa lembaga ini memiliki ketangguhan dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Dalam situasi dinamis, kemampuan adaptasi dan musyawarah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi lembaga. *Keempat*, aturan lembaga yang didirikan melalui proses musyawarah dan partisipatif mencerminkan semangat kebersamaan dan inklusivitas dalam PKDP. Implikasi positifnya adalah bahwa PKDP telah membangun dasar yang kuat dan legitimasi yang diterima oleh para anggota dan masyarakat. Aturan ini juga menunjukkan bahwa PKDP telah mampu menciptakan struktur organisasi yang representatif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi anggota.

Hasil penelitian seperti penjelasan di atas dapat dijelaskan oleh beberapa faktor menentukan yang berperan dalam membentuk dinamika lembaga tersebut. *Pertama*, pola pengurus dan anggota

yang inklusif dalam PKDP dapat terjadi karena adanya kesadaran dan komitmen para tokoh agama untuk bersama-sama membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama di desa. Mereka menyadari pentingnya kehadiran lembaga yang mewadahi semua agama dalam menghadapi tantangan dan konflik yang mungkin muncul. Selain itu, partisipasi anggota yang beragam juga mencerminkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa yang lebih inklusif. *Kedua*, model kepemimpinan kolektif kolegial di PKDP dipilih karena mengandung nilai-nilai kebersamaan yang sudah melekat kuat dalam budaya masyarakat Desa Pabuaran. Model ini juga memperkuat keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Keberagaman pengurus yang dipilih berdasarkan usungan dari umat masing-masing juga bermakna sebagai bentuk representasi yang mengakomodasi aspirasi dari berbagai agama.

*Ketiga*, tekanan kelembagaan yang dihadapi PKDP mencerminkan tantangan dari dalam dan luar lembaga. Dari dalam, tekanan muncul karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan di antara anggota yang dapat menimbulkan konflik internal. Namun, kemampuan PKDP untuk mengatasi tekanan tersebut menunjukkan kematangan dan komitmen anggota untuk menjaga kesatuan di antara mereka. Dari luar, tekanan muncul karena PKDP harus berurusan dengan institusi pemerintah dan masyarakat luas dalam mencari legalitas dan dukungan. Kemampuan PKDP untuk beradaptasi dan bernegosiasi dengan berbagai pihak menunjukkan kemampuan berjejaring lembaga yang terus diasah. *Keempat*, aturan lembaga yang didirikan melalui proses musyawarah mencerminkan nafas demokratis dalam mengambil keputusan. Proses ini memungkinkan semua anggota

untuk memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan lembaga. Keberagaman anggota juga memastikan bahwa aturan yang dihasilkan mewakili kepentingan berbagai agama. Selain itu, aturan lembaga ini juga mencerminkan komitmen untuk membangun lembaga yang berbasis pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan inklusivitas.

Selanjutnya, rekonsiderasi dari hasil penelitian ini terdiri atas beberapa langkah yang mengerucut pada perbaikan kualitas kelembagaan, sebagaimana berikut : *Pertama*, Membangun kapasitas kepemimpinan dengan menyediakan pelatihan manajemen, komunikasi, dan kepemimpinan yang efektif dalam mengelola lembaga dan menjalin hubungan dengan pihak luar. *Kedua*, Memperkuat mekanisme penyelesaian konflik internal dengan cara membangun budaya dialog dan komunikasi yang terbuka sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara baik.

*Ketiga*, Memperkuat jaringan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti institusi pemerintah, organisasi agama, dan lembaga sosial lainnya untuk mendukung berjalannya berbagai program kerja.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang penulis teliti tentang dinamika Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP) dalam menjaga kerukunan umat beragama di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian mendapati beberapa temuan terkait kepengurusan dan anggota, aturan kelembagaan, kepemimpinan dan tekanan kelembagaan sebagai berikut : *Pertama*, PKDP dibentuk dengan dasar kebersamaan dalam keberagaman. Setiap anggota

memiliki pengaruh yang sama dan hak yang setara dalam bermusyawarah dan pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan banyak lembaga lain yang seringkali memiliki hirarki yang ketat dan dominasi dari beberapa individu tertentu. *Kedua*, adanya mekanisme rotasi kepemimpinan yang berimbang antar agama telah menjadi langkah yang progresif dan inklusif dalam memastikan keberagaman diwakili secara merata dalam pimpinan lembaga. Temuan ini berbeda dengan beberapa lembaga lain yang cenderung menunjuk pemimpin berdasarkan preferensi kelompok mayoritas. *Ketiga*, temuan menunjukkan bahwa PKDP mampu mengatasi tekanan dari dalam dan luar lembaga dengan baik. Dalam menghadapi tekanan dari dalam, PKDP membangun budaya dialog dan komunikasi yang terbuka untuk menyelesaikan konflik. Sementara itu, untuk menghadapi tekanan dari luar, PKDP membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Temuan ini mengejutkan karena PKDP mampu menjaga keutuhan dan kestabilan lembaga dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. *Keempat*, PKDP secara berkala melakukan evaluasi dan revisi aturan lembaga agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial. Seluruh anggota terlibat dalam proses evaluasi dan revisi untuk memastikan kesesuaian aturan dengan aspirasi anggota. Temuan ini berbeda dengan beberapa lembaga lain yang cenderung kurang responsif terhadap perubahan sosial.

2. Penelitian mengenai Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP) memberikan sumbangan berharga dalam bentuk konsep dan metode baru yang relevan untuk mengelola

lembaga kerukunan desa yang efektif dan inklusif. *Pertama*, penelitian ini memberikan konsep kebersamaan dalam keberagaman sebagai dasar pembentukan PKDP. *Kedua*, penelitian ini memperkenalkan metode rotasi kepemimpinan berdasarkan keberagaman agama yang bertujuan untuk memastikan kepemimpinan yang inklusif dan merata. *Ketiga*, sumbangan penelitian ini terletak pada konsep membangun budaya dialog dan komunikasi terbuka untuk mengatasi tekanan dari dalam lembaga. *Keempat*, PKDP menyumbangkan konsep evaluasi dan revisi aturan secara berkala untuk menjaga kesesuaian dengan perkembangan masyarakat dan sosial.

3. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan terutama dalam penggunaan hasil penelitian. Dengan kata lain, meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang PKDP sebagai lembaga kerukunan, namun penelitian ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman terutama tentang tantangan yang dihadapi lembaga ini dalam beroperasi dan mencapai tujuan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Muhamad. 2003. *Teologi Pluralis-Muktikuktural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar, Marzani. 2011. *Potret Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Bagian Barat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Anwar, Yesmil, Adang. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Cet. Ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cresswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approches. Third Edition*. California: SAGE Publication.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Bahtiar., dkk. 2011. *Agama dan Demoratisasi: Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, Syahrin. 2011. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Agama & Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*. Bandung: Pustaka Setia.
- King, Nigel and Christine Horrocks. 2010. *Interviews in Qualitative Research*. London: SAGE Publication.
- Lubis, M. Ridwan. 2016. *Kerukunan Beragama dalam Cita dan Fakta*. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.
- M, Jogyanto Hartono. 2018. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Milawati. 2017. *Dinamika Lembaga Majalah Suara Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 1915-1965 M*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, M. Atho., dkk. 2008. *Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, cet. 7*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar dan*

- Terapan. Edisi Keempat.* Jakarta: Prenada Media Group.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani., dkk. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar.* Jakarta: RajaGrafindo Persada .
- Oehring, Otmar. 2019. *The Tension Between Tolerance, Harmony of Religions and Freedom of Religion.* Berlin: Konrad Adenauer Stiftung.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Surakarta: Unisri Press.
- Prawiranegara, Sjafruddin. 2011. *Agama dan Bangsa: Pembangunan dan Masalah-masalahnya.* Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2013. *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2014. *Memelihara Harmoni dari Bawah: Peran Kelompok Keagamaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010. *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.* Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Qur'an Kemenag. Tanpa Tahun. *Surat Al-A'raf Ayat 56.* Diakses Juni 2, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/sura/7>.
- Rusdiana, A. 2013. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.* Bandung: Tresna Bhakti Press.
- Salim, Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Citapustaka Media.
- Schumann, Olaf H. 2008. *Dialog Antarumat Beragama.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Kerukunan Beragama dari Perspektif Negara, HAM, dan Agama-agama.* Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Revisi.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik.* Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI.
- Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2014. *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan dan Konflik Keagamaan di Indonesia.* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Tim Puslitbang Kehidupan Beragama. 2008. *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama: Edisi Kesepuluh.* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Jurnal, Artikel, Skripsi dan Tesis:**
- Achmad, Noor. 2013. "Inter-Religious Harmony: a Historical Overview." *Tasawuf: Indonesian Journal of Moderate Islam* 4.
- Akbar, Muqarrab and Hafsa Yaseen. 2020. "Interfaith Harmony in Pakistan: An Analysis." *Global Political Review* 16.
- Andrabi, Abroo Aman. 2020. "Interfaith Dialogue: Its Need, Importance and Merits in The Contemporary World." *International Journal of Advanced Academic Studies* 265-267.

- Andriana. 2016. *Kelembagaan Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat (Rumah Tangga) Petani Miskin di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. Tesis, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anggreni, Dwi. 2021. *Dinamika Kelompok Tani di Nagari Puluik-Puluik Selatan, Kecamatan IV Nagari Yayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi, Padang: Universitas Andalas.
- Ardiansyah. 2013. *Kerukunan Umat Beragama Antara Masyarakat Islam dan Kristen di Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Skripsi, Makassar: UIN Alauddin.
- Banban, Dorjie. 2018. "Harmony in Diversity: An Empirical Study of Harmonious in the Multi-Ethnic Culture of Qinghai." *International Journal of Anthropology and Ethnology* 1.
- Brousseau, Eric and Emmanuel Raynaud. 2008. "Climbing the Hierarchical Ladders of Rules: the Dynamics of Institutional Framework." *Paper has been presented at the 11th annual ISNIE conference* 2.
- Budiyono., et al. 2017. "Social Cohesion in Society: A Study on Inter-Religious Harmony." *Proceedings of the 2nd International Conference of Sociology Education (ICSE)* 159.
- Burns, Tom R and Marcus Carson. 2002 "Actors, Paradigms, and Institutional Dynamics." *Appears in Rogers Hollingsworth K.H. Muller, E.J. Hollingsworth (eds) Advancing Socio-Economics: An Institutional Perspective*. Rowman and Littlefield, Oxford 7.
- Butler, Diana. 2016. "Peace and Harmony in the World Based on Pancasila and Bhineka Tunggal Ika (Unity in Diversity)." *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 34-35.
- Cameron, Catherin M and John B. Gatewood, 1994. "The Authentic Interior: Questing Gemeinschaft in Post-Industrial Society", *Human Organization* 28.
- Daimah. 2018. "Peran Perempuan dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia." *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 128-129.
- Devi, Dista Putri. 2018. *Dinamika Himpunan Paguyuban Keluarga Jawa (HPKJ) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. Skripsi, Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Fedayyen, Muhammad Yasser. 2019. "Implementasi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Poso Studi Atas Kegiatan FKUB." *Jurnal Ilmiah Administratie* 22.
- Florensa, Meritxell Costeja. 2002. "Inquiring about the Dynamics of Institutional Change, Some lessons from the Modernisation of the Mula huerta in Murcia, Spain." *Paper to be presented at the Mini-Conference of the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington* 2-19.
- Hastuti, Endang Lestari. 2009. "Dinamika Kelembagaan Hubungan Ketenagakerjaan di Masyarakat Pedesaan." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 118.
- Herbasuki. 2016. "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kota Semarang." *Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 57.
- Hyka, Ardela. 2020. "Interreligious Relations in a Secular Context." *Astrolabe: A CIS Student Research Journal* 3.
- Ikhwan, M. 2020. "Shari'ah in the Public Sphere: The Discourse and Practices of Islamic Law and Inter-Religious

- Tolerance and Harmony.” *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* 9-10.
- Indra, Satria. 2016. *Peranan Institusi Adat dalam Proses Pengadilan Sosial Masyarakat di Lamahala Jaya Kabupaten Flores Timur*. Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Indriana, Hana., dkk. 2016. "Dinamika Kelembagaan Pertanian Organik Menuju Pembangunan Berkelanjutan.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 196.
- Ismail, 2021. “Kerukunan Antarumat Beragama: Studi Ikatan Kewargaan dan Asosiasional Pada Masyarakat Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Bogor”. *Jurnal Penamas Balai Litbang Agama Jakarta* 367.
- Kewuel, Hipolitus Kristoforus., Franciscus Apriwan and Aji Prasetya Wahyu Utama. 2020. "Inter-Faith Harmony Forum and the Ethnographic Stories: Behind the Harmonious Life of Malang People.” *ISCS* 4-7.
- Kruja, Genti. 2020. “Interfaith Dialogue in Albania as a Model of Interreligious Harmony .” *Journal o Ethnic and Culture Studies* 77-79.
- Mahmod, Nik Ahmad Kamal Nik., et al. 2022. “An Analysis of Islamic Principles on Religious Diversity and Religious Freedom at Workplaces.” *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences* 1186.
- Maimun dan Abdul Haq Syawqi. 2020. “Does Sharia By-laws Damage Interfaith Harmony?: The Case of Sharia By-laws Implementation in Pamekasan, Madura.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 108-113.
- Malik, Jamal. 2006."Inter-Religious Dialogue.” *Naskah yang diterbitkan oleh Policy Department Structuraland Cohesion Policies European Parliament* 5-7
- March, James G and Johan P. Olsen. 1998. "The Institutional Dynamics of International Political Orders", *International Organization* 948.
- Misnati dan Sunarso. 2020. "Strengthening the United The Republic of Indonesia by Utilizing the Forum of Religious Records.” *International Journal Of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 623.
- Nuningsih. 2018. *Pengembangan Sosial dan Pola Paguyuban Masyarakat Agraris (Studi Kasus Sosial Petani Besar dan Petani Kecil di Desa O'o Dompu*. Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nursekhah, Ulfah. 2018. *Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016*. Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Olsen, Johan P. 2005. "The Institutional Dynamics of the (European) University.” *Working Paper No. 15, Arena: Centre for European Studies, University of Oslo* 38.
- Permadi, Aad Satria., Rozmi Ismail and Arena Bt. Che Kasim. 2022. "Content Validity and Exploratory Factor Analysis (EFA) on 26 Items of The Interreligious Harmony Scale.” *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 16.
- Qodir, Abdul. 2011. *Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat)*. Tesis, Depok: Universitas Indonesia.

- Rimawati. 2015. "Perwujudan Paguyuban Masyarakat dan Nilai Kebersamaan dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Sleman." *Mimbar Hukum* 31.
- Sari, Etika dan Elis Mayanti Rambe. 2018. "Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu." *Jurnal Bimas Islam* 338-341.
- Schneider, Nadja Christina. 2020. "Tea for Interreligious Harmony? Cause Marketing as a New Field of Experimentation with Visual Secularity in India." *Working Paper Series of the HCAS "Multiple Secularities - Beyond the West, Beyond Modernities", 20, Leipzig University* 28.
- Setu, Ferdinandus. 2021. *Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital*. 26 April. Diakses Januari 08, 2022.  
[https://kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers).
- Shin, Doh Chull and Rollin F. Tusalem 2007. "The Cultural and Institutional Dynamics of Global Democratization: A Synthesis of Mass Experience and Congruence Theory." *Taiwan Journal of Democracy* 2.
- Suharti, Sri., dkk. 2016. "Kelembagaan dan Perubahan Hak Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Sinjai Timur Sulawesi Selatan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 165.
- Syahyuti. 2003. "Alternatif Konsep Kelembagaan Untuk Penajaman Operasional dalam Penelitian Sosiologi." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 114-124.
- Syukron, Buyung. 2017. "Agama dan Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia)." *RI'AYAH* 7.
- Ulfaturrohmatiririn, Zahro., et al. 2021. "Managing Plurality to Boost Harmony Among Religious Adherents in Indonesia", *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 140-141.
- Varkey, Thomas. 2017. "Peaceful Co-existence in Multi-religious India through Interreligious Dialogue: The Mode of being the Church in India today with Special Reference to 'Dialogue of Life'." *Sophia University Junior College Division Faculty Journal* 28.
- Wallis, John Joseph. 2011. "Institutions, Organizations, Impersonality, and Interests: The Dynamics of Institutions." *Journal of Economic Behavior & Organization (JEBO-2703)* 1.
- Woolthuis, Rosalinde J.A. Klein and Yvette Taminiau. 2017. "Waves of Change - The Dynamics of Institutional Pressures." *Working Paper Series 11711 - CSE, Centre for Sustainable Entrepreneurship, University of Groningen/Campus Fryslân* 9.
- Young, Oran R. 2009. "Institutional Dynamics: Resilience, Vulnerability, and Adaptation in Environmental and Resource Regimes." *Journal Global Environmental Change*-729 2.
- Zulkefli, Mohd Ikhwan Izzat., et al. 2018. "Toward Ensuring Inter-religious Harmony in A Multi-religious Society of Perak." *ICHSS* 4-6.

---

Catatan Kaki:

<sup>1</sup> Buyung Syukron, “Agama dan Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia)”, *RI'AYAH*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017, hlm. 7

<sup>2</sup> Ferdinandus Setu, “Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital” diakses dari [https://kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers) pada tanggal 8 Januari 2022 pukul 11.05

<sup>3</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 93-94

<sup>4</sup> Qur'an Kemenag, “Surat Al-A'raf Ayat 56” diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/7> pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 13.01

<sup>5</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, Agama & Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 222

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 222

<sup>7</sup> John W. Cresswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 58